

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pemerintahan di negara Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang semuanya bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintahan yakni Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat yang kemudian pemerintah pusat bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan baik dalam pelayanan maupun fasilitas harus seimbang. Secara umum pelayanan pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintah daerah berpengaruh langsung kepada kelangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangan lebih lanjut, negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia dengan cepat mengadopsi lembaga-lembaga kapitalis barat. Terjadilah transformasi sosial dengan skala maha luas yang belum pernah dibayangkan sebelumnya dimana lembaga-lembaga tradisional atau mereka harus eksis berdampingan dengan lembaga-lembaga modern. Menanamkan fenomena ini sebagai *dual economy Model* yang terdiri dari sektor kapitalis dan sektor subsisten yang tidak jarang keduanya saling bersaing. Secara demografis, masyarakat selalu tumbuh dan berkembang. Akibatnya, baik kuantitatif ataupun kualitatif kebutuhan hidupnya juga berkembang. Akibat lanjutannya, terjadi pengembangan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup tadi. Upaya-upaya itu tidak lain adalah peningkatan kemampuan akal atau intelektual manusia yang kita sebut kebudayaan.¹ Kebudayaan pada dasarnya merupakan karya kreatif dan sebagainya. akan segala macam bentuk gejala kemanusiaan baik yang mengacu

¹ Panji Anaroga. (2011) Pengantar Bisnis "Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi". Jakarta: Rineke Cipta. Hal 23

pada sikap, konsepsi, ideologi, perilaku, kebiasaan karya kreatif dan sebagainya. Secara kongkrit kebudayaan bisa mengacu pada adat idtiadat, bentuk-bentuk tradisi lisan, seni, bahasa dan pola interaksi. Dengan kata lain kebudayaan merupakan fakta kompleks yang selain memiliki kekhasan pada batas tertentu juga memiliki ciri yang bersifat universal. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk (demografi) mendorong terjadinya pertumbuhan kebutuhan mendasar yaitu pangan, sandang dan papan (ekonomi) manusia memenuhi tuntutan pertumbuhan demografis dan ekonomi. Dan bahkan, hal tersebut mendorong pula peningkatan tuntutan kebutuhan lainnya seperti ketertiban, keamanan, kebijakan kepemimpinan dan seterusnya.

Dalam menghadapi beratnya tekanan persaingan Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak tiga puluh tahun aatau dua puluh tahun yang lalu karena sumberdaya manusia yang handal yang dapat menjadi keunggulan kompotitif bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapat manfaat dari era globalisasi tersebut. Sumberdaya manusia mempunyai etos kerja tinggi, terlatih, terampil sebuah organisasi dapat melakukan pelatihan, pendidikan dan pembimbingan bagi sumberdaya manusia. Hanya saja untuk menghasilkan kinerja dan prestasi kerja yang tinggi tidak hanya perlu memiliki keterampilan tetapi juga harus memiliki keinginan dan kegairahan untuk berprestasi tinggi untuk berkembang tidaknya suatu organisasi baik organisasi pemerintahan maupun swasta, sangat ditentukan oleh anggota personil dari organisasi itu sendiri (Munir, 1991).

Krisis Ekonomi memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional,di antaranya meningkatnya angka kemiskinan masyarakat di Indonesia. Untuk hal tersebut maka pemerintah menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang ada di tingkat

nasional. Penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.²

Beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah, beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- Menyempurnakan program perlindungan sosial
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- Pemberdayaan masyarakat, dan
- Pembangunan yang inklusif

Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk aktualisasi tugas dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga aparat mempunyai kewajiban untuk menjadi pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Pada kenyataannya bahwa justru warga

² Rahardjo. (2010). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

masyarakatlah yang menjadi pelayanan Masyarakat. Sikap dan perilaku aparat pemerintah yang tidak tersedia melayani kepentingan masyarakat secara adil dan memuaskan masih tampak di berbagai instansi pemerintahan desa. Aparat pemerintah desa masih mempunyai anggapan bahwa bekerja adalah merupakan rutinitas belaka, sehingga pelaksanaan tugas menjadi kaku dan lamban serta kurang responsive. Hal ini dapat dilihat dari hampir segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah desa dalam kehidupan sehari-hari.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah akan membawa dampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya akan membentuk suatu opini bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, namun bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan pemerintah terlalu rumit dan berbelit-belit, lamban dan memerlukan biaya yang besar. Dengan demikian masyarakat menjadi enggan untuk berurusan dengan pemerintah jika tidak benar-benar terpaksa.

Berdasarkan hasil survei di lapangan yakni Desa Sidoharjo pemerintah setempat mengungkapkan bahwa fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Namun dalam melaksanakan fungsinya tersebut banyak pelayanan yang kurang dalam pelaksanaannya dikarenakan kendala yang dihadapi baik yang datang dari warga masyarakat maupun dari aparat pemerintahan desa sendiri. Dalam melaksanakan fungsinya pelayanan kepada masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1678 jiwa yang tersebar pada 6 dusun, aparat pemerintah desa Sidoharjo didukung oleh 6 orang pegawai kantor desa. Dengan jumlah pegawai yang tidak memadai dan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat banyak kekurangan sehingga tidak jarang datang berbagai keluhan dari masyarakat yang dilayani. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan sementara, banyak keluhan masyarakat yang berkaitan dengan

kualitas layanan di desa Sidoharjo.³ Bahkan menurut keterangan yang penulis dapatkan bahwa dalam berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat bisa mencapai atau mendapatkannya lebih lama dari apa yang seharusnya. Kondisi demikian ini didukung lagi dengan perilaku aparat yang terkesan kurang simpatik, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cenderung dirasakan tidak memuaskan. Kondisi ini diperparah lagi dalam pelayanan untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu, dimana pemerintah menjanjikan pada masyarakat akan mendapatkan bantuan, namun realisasinya belum terpenuhi sampai saat ini. Bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah desa antara lain bantuan rumah layak huni yang terdiri dari semen, seng, bantuan ternak sapi bagi keluarga yang kurang mampu dan layanan ASKES bagi warga masyarakat yang belum terealisasi sampai saat ini.⁴

Dari uraian di atas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bantuan pemerintah kepada masyarakat, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Bantuan Sosial Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolagohula Kabupaten Gorontalo (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui rumusan masalah tersebut, dalam permasalahan proses pelayanan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa Sidoharjo maka yang menjadi fokus dari penelitian yakni:

Pertama, bagaimana perkembangan pemerintahan desa Sidoharjo? *Kedua*, bagaimana proses penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat desa Sidoharjo? *Ketiga*, apa saja faktor yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan sosial pemerintah oleh pemerintahan Desa Sidoharjo? *Keempat*, bagaimana pandangan masyarakat tentang pemerintah kepada masyarakat Desa Sidoharjo?

³ Kepala Desa Sidoharjo Bapak Samsul Hadi, S.Pdi, Wawancara 16 September 2013

⁴ Penuturan Bapak Sugeng Selaku Salah Satu Warga Masyarakat Desa Sidoharjo, Wawancara 16 September 2013

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pelayanan pemerintah tentang kebijakan bantuan sosial desa di desa Sidoharjo kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
- 1.2.2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang kebijakan bantuan sosial pemerintah di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Dapat mendeskripsikan poses pelayanan pemerintah tentang kebijakan bantuan sosial di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
- 1.4.2 Dapat mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang kebijakan bantuan sosial pemerintah di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Teoritis

- 1.5.1 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur Pemerintah Desa Sidoharjo dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat desa maupun dalam pemerintahan.
- 1.5.2 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu sosial maupun ilmu pemerintahan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para akademisi yang tertarik mengkaji masalah pemerintahan desa.